

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DPR RI MELALUI APLIKASI DPR E-LIBRARY

Magfira^{1*}, Agung Edi Rustanto², Ahmad Hidayat Sutawidjaya³,
Deddy Supriady Bratakusumah⁴
^{1,2,3,4} Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: magfira369@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan DPR RI melalui aplikasi DPR E-Library berdasarkan teori Edward III, di mana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi termasuk. Melibatkan pengelola perpustakaan, anggota DPR RI, dan masyarakat umum, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Studi ini membantu orang lebih memahami bagaimana menerapkan kebijakan digital di lembaga legislatif dan menawarkan saran tentang cara mengoptimalkan layanan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Library DPR RI telah membantu meningkatkan akses ke informasi dan meningkatkan budaya literasi di dalam DPR RI. Namun, tingkat sosialisasi yang rendah masih menghambat program, yang mengakibatkan rendahnya pemanfaatan masyarakat umum. Kelancaran layanan terhambat oleh keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia, sementara inovasi dibatasi oleh regulasi yang belum diperbarui. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang buruk dan disposisi pelaksana yang berbeda.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, digitalisasi perpustakaan, DPR E-Library, Edward III, minat baca.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the DPR RI library management policy through the DPR E-Library application based on Edward III's theory, where communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are included. Involving library managers, members of the DPR RI, and the general public, a descriptive qualitative approach is used through observation, documentation, and in-depth interviews. This study helps people better understand how to implement digital policies in legislative institutions and offers suggestions on how to optimize public information services. The results of the study indicate that the DPR RI E-Library has helped improve access to information and improve literacy culture within the DPR RI. However, the low level of socialization still hampers the program, resulting in low utilization by the general public. The smoothness of services is hampered by limited technological infrastructure and human resources, while innovation is limited by regulations that have not been updated. The success of policy implementation is influenced by poor communication and different dispositions of implementers.

Keywords : Policy implementation, library digitalization, DPR E-Library, Edward III, reading interest.

A. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk manajemen perpustakaan, diperlukan transformasi digital. Perpustakaan harus mendukung budaya literasi dan memperluas akses informasi dengan menyediakan layanan berbasis digital seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Perpustakaan DPR RI melakukan transformasi dengan membuat aplikasi DPR E-Library, yang memungkinkan pengguna dari DPR dan masyarakat umum mengakses koleksi perpustakaan secara online (Aini & Amin, 2023; Setiawan & Purnomo, 2020).

Aplikasi Perpustakaan E-DPR diluncurkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Aplikasi digital ini memudahkan akses ke berbagai jenis literatur pustaka, seperti buku, majalah, dan surat kabar (Budianto & Nugroho, 2022). Data menunjukkan bahwa aplikasi ini masih kurang digunakan, meskipun sudah tersedia secara teknis sejak 2019. Jumlah pengguna yang aktif tidak meningkat secara signifikan setiap tahun; bahkan hingga akhir 2024, tercatat hanya 2.878 pengguna, jauh di bawah jumlah anggota staf dan profesional DPR RI (Hidayati, 2021). Menurut Pratiwi (2023), fenomena ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tingkat adopsi pengguna dan ketersediaan layanan digital. Sebaliknya, kualitas layanan digital, terutama dalam hal kemudahan akses dan kenyamanan pengguna, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi layanan digital.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana kebijakan digitalisasi layanan perpustakaan DPR RI diterapkan dengan

menggunakan aplikasi E-Library DPR. Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan Edward III digunakan. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah empat bagian utama teori ini (Edward III, 1980). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berhasil dan berdampak pada peningkatan minat baca pengguna (Setiawan & Purnomo, 2020).

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar studi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan transformasi digital sektor publik. Secara praktis, hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan layanan DPR E-Library, meningkatkan efisiensi, dan mendorong penggunaan perpustakaan digital yang lebih baik di masa depan (Wibowo & Kurniawan, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar studi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan transformasi digital sektor publik. Secara praktis, hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan layanan DPR E-Library, meningkatkan efisiensi, dan mendorong penggunaan perpustakaan digital yang lebih baik di masa depan. Menurut Yin (2018), Metode ini dapat digunakan untuk menyelidiki fenomena kontekstual yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Bagian Perpustakaan dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI bertanggung jawab atas penyelidikan ini, yang dilakukan dari Maret hingga April

2025. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan penggunaan langsung aplikasi E-Library DPR. Metode wawancara semi-terstruktur digunakan terhadap lima informan penting: Kepala Bidang Perpustakaan, dua staf teknis, satu staf TI, dan satu pengguna aktif dari kalangan internal DPR. Metode ini dipilih karena memberi peneliti fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik apa pun yang mereka inginkan sambil mempertahankan fokus penelitian (Creswell & Poth, 2018). Untuk memahami pengalaman pengguna dan fungsi layanan digital, peneliti menggunakan aplikasi di laptop dan ponsel untuk melakukan observasi secara langsung.

Data sekunder berasal dari dokumentasi internal tentang pengembangan aplikasi, data statistik penggunaan layanan, Laporan Tahunan Perpustakaan DPR RI, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perpustakaan. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mendapatkan pemahaman tentang latar belakang kebijakan dan bagaimana kebijakan diterapkan.

Menurut Sugiyono (2019), Pemilihan informan didasarkan pada partisipasi langsung informan dalam proses pengembangan dan penggunaan aplikasi. Data dikumpulkan selama tiga minggu melalui wawancara dan observasi di lokasi. Semua wawancara direkam, ditranskripsi, dan diverifikasi ulang menggunakan teknik pengawasan anggota untuk memastikan bahwa data tersebut benar (Lincoln & Guba, 1985). Untuk melakukan analisis data, model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014) dipakai. Terdapat tiga tahap utama

dalam analisis: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dipresentasikan dalam bentuk tabel kategorisasi dan narasi deskriptif. Informasi yang relevan dari observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi dihilangkan. Untuk mencapai kesimpulan, hasil dihubungkan dengan teori yang digunakan selama proses analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Dimensi Komunikasi

Dalam penelitian ini, komunikasi menjadi bagian penting dari penggunaan DPR E-Library. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengetahui aplikasi ini melalui cara yang lebih informal, seperti berbicara dengan sesama pengguna dan menggunakan media sosial, daripada melalui cara resmi yang diberikan oleh DPR. (Liu et al., 2021; Kurniawan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi resmi pemerintah masih gagal menyampaikan informasi kepada masyarakat (Rachmawati & Surya, 2020). Banyak pengguna menyatakan bahwa mereka kurang informasi tentang cara menggunakan aplikasi ini dan manfaatnya. (Jamil & Rahmawati, 2021). Oleh karena itu, saluran resmi seperti email, situs web, dan pengumuman di acara resmi harus digunakan untuk menyebarkan informasi tentang aplikasi (Prasetyo, 2022; Sari & Nugroho, 2023).

Selain itu, sebagian besar orang yang menjawab mengatakan bahwa mereka tidak memiliki instruksi atau informasi yang cukup tentang cara menggunakan aplikasi ini. Sebagian besar dari mereka hanya bergantung pada tutorial atau penjelasan komunitas pengguna atau sesama pengguna, yang seringkali tidak terstruktur atau detail. Ini menunjukkan bahwa tidak

ada petunjuk tentang cara menggunakan aplikasi dan fungsinya. Panduan pengguna harus disediakan dalam bentuk tulisan, video tutorial, atau webinar interaktif untuk membuat aplikasi ini lebih mudah digunakan.

Aplikasi ini sedikit lebih mudah digunakan, menurut pengguna yang lebih terbiasa dengan teknologi digital. Namun, mereka juga menyarankan agar informasi tambahan tentang aplikasi dan fiturnya tersedia secara mudah. Sebaliknya, orang yang tidak terbiasa dengan teknologi digital mungkin merasa sulit untuk menggunakan aplikasi ini tanpa bantuan atau bimbingan dari petugas. Ini menunjukkan bahwa pengelola aplikasi harus dapat berinteraksi dengan orang-orang di seluruh masyarakat, termasuk orang-orang yang belum terbiasa dengan teknologi. Akibatnya, memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi yang diperlukan sangat penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2021) tentang tidak peduli seberapa baik komunikasi kebijakan publik, masalah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sering menyebabkan kebijakan publik tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, masyarakat mungkin tidak menggunakan aplikasi DPR E-Library jika tidak diberitahu dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbarui strategi komunikasi mereka agar dapat mencapai lebih banyak orang. Untuk mencapai hal ini, mereka harus bekerja sama dengan komunitas lokal dan menggunakan saluran yang lebih mudah diakses dan inklusif, seperti media sosial dan situs web resmi.

Pengelola aplikasi harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan aplikasi kepada masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Penggunaan teknologi

informasi yang lebih baik, seperti bantuan langsung melalui webinar atau chat live, juga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Sistem pengaduan atau feedback yang lebih interaktif dapat memudahkan pengguna untuk melaporkan masalah mereka dan memberikan saran untuk perbaikan aplikasi.

2) Dimensi Sumber Daya

Ukuran sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh kualitas konten, ketersediaan, dan teknologi yang digunakan dalam aplikasi E-Library DPR. Kualitas dan keanekaragaman koleksi perpustakaan digital sangat penting, dan kemampuan pengguna untuk mengakses materi yang mereka butuhkan sangat penting. Sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengatakan bahwa aplikasi perpustakaan digital ini memberikan akses yang cukup baik terhadap berbagai materi yang relevan dan dibutuhkan oleh pengguna, baik dalam bentuk dokumen teks, jurnal, maupun kebijakan. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa sumber daya bacaan yang tersedia terbatas, terutama yang berkaitan dengan topik penelitian ilmiah dan kebijakan publik yang lebih baru atau lebih spesifik. Sebagian besar koleksi yang ada dianggap terbatas pada topik-topik tertentu dan tidak mencakup semua kebutuhan literasi pengguna, terutama yang berkaitan dengan kebijakan, studi kasus, atau penelitian terbaru (Kumar & Singh, 2019; Martin & Lee, 2020).

Selain itu, beberapa orang yang disurvei mengatakan bahwa sedikit yang dibaca tentang riset kebijakan terbaru meskipun aplikasi menyediakan banyak materi bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini belum memenuhi kebutuhan pengguna yang memiliki literasi

digital yang luas, terutama bagi mereka yang membutuhkan informasi yang lebih rinci dan terkini untuk penelitian atau studi kebijakan. Kualitas teknologi yang digunakan dalam aplikasi DPR E-Library juga sangat penting untuk pengalaman pengguna. Sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi ini dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, dari pelajar hingga profesional (Johnson, 2021). Meskipun sebagian besar responden menganggap antarmuka aplikasi sederhana dan mudah digunakan, beberapa mencatat bahwa akses dan pencarian dokumen terkadang terhambat, terutama ketika mengakses konten dalam jumlah besar atau di daerah dengan koneksi internet yang tidak stabil.

Dalam kaitannya dengan teori implementasi kebijakan Edward III, elemen sumber daya ini sangat penting untuk menentukan seberapa efektif dan efisien suatu kebijakan publik. Pengendalian yang tepat atas sumber daya, yang mencakup teknologi dan pengelolaan konten, dapat berdampak pada pencapaian tujuan kebijakan (Edwards & Wynne, 2018). Untuk tetap relevan dan berkualitas sebagai sumber daya literasi kebijakan, koleksi materi di E-Library DPR harus diperbarui dan ditambahkan secara berkala. Perubahan memerlukan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, staf yang berpengalaman, dan infrastruktur teknologi yang mendukung (Smith, 2020). Penelitian ini menyarankan agar pengelola melakukan evaluasi rutin terhadap koleksi yang ada dan mempertimbangkan umpan balik pengguna untuk memastikan bahwa aplikasi E-Library DPR terus berkembang dan memenuhi kebutuhan literasi pengguna dalam menghadapi tantangan kebijakan yang semakin kompleks.

Sebagian besar responden mengatakan bahwa aplikasi ini membuat mendapatkan buku atau artikel yang sebelumnya sulit diakses, terutama bagi mereka yang jauh dari pusat perpustakaan atau memiliki keterbatasan waktu. Namun, banyak orang menyatakan bahwa tampilan aplikasi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Beberapa pengguna mengatakan bahwa aplikasi terlalu lambat atau tidak responsif, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Masalah ini mengurangi kenyamanan pengguna dan efektivitas aplikasi dalam menyediakan layanan terbaik.

Banyak responden juga menyukai fitur pencarian aplikasi; mereka mengusulkan peningkatan sistem dengan filter kategori yang lebih akurat dan kemampuan pencarian yang lebih canggih. Selain itu, sebagian besar responden berharap bahwa aplikasi ini akan memberikan pengguna informasi yang lebih lengkap dan up-to-date dengan menyediakan akses ke lebih banyak buku, artikel, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Fitur-fitur ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menemukan konten yang relevan dengan topik yang mereka cari.

Selain itu, Nugroho (2020) menunjukkan dalam penelitiannya tentang manajemen aplikasi digital dalam sektor publik bahwa pengelolaan konten dan teknologi sangat penting untuk keberhasilan aplikasi. Menurutnya, aplikasi yang efektif harus memiliki konten yang lengkap dan relevan yang mudah diakses. Jika tidak, pengguna tidak akan puas dan akan terus menggunakannya. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang aplikasi bergantung pada pengelolaan koleksi dan pemeliharaan.

Karena mereka menyadari pentingnya mengelola sumber daya ini, pengelola aplikasi harus memastikan bahwa aplikasi ini dapat digunakan dengan lancar di berbagai perangkat, dengan mengoptimalkannya untuk perangkat dengan spesifikasi rendah, dan mengembangkan fitur pencarian yang lebih canggih. Peningkatan ini akan membuat aplikasi DPR E-Library lebih mampu memenuhi harapan pengguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

3) Dimensi Disposisi

Dalam penelitian ini, disposisi pelaksana dikaitkan dengan sikap dan perilaku pengelola aplikasi, serta petugas yang bekerja untuk menjalankan dan memelihara aplikasi E-Library DPR. Mayoritas orang yang menjawab mengatakan mereka merasa terbantu ketika mereka mengalami masalah teknis. Namun, beberapa orang yang mengajukan masalah menyatakan bahwa mereka baru menerima tanggapan beberapa hari setelah mengajukan masalah, yang membuat aplikasi tidak nyaman untuk digunakan. Hal ini menyebabkan pengelola aplikasi tampak tidak siap dan tidak responsif dalam menangani kebutuhan dan masalah pengguna.

Sikap pelaksana yang tidak responsif ini dapat menyebabkan aplikasi menjadi kurang percaya diri. Meskipun aplikasi ini memiliki banyak fitur, pengguna cenderung memilih aplikasi yang lebih responsif dan mudah digunakan. Oleh karena itu, pengelola aplikasi harus memprioritaskan layanan pengguna yang responsif, terutama dalam menangani masalah teknis atau pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah menyediakan saluran bantuan langsung seperti live chat

atau layanan pelanggan melalui telepon yang dapat diakses dengan mudah.

Menurut studi Edward III (1980) tentang penerapan kebijakan, sikap pelaksana sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Ini juga berlaku untuk aplikasi digital, di mana sikap pelaksana dalam menyelesaikan masalah dan memberikan solusi sangat memengaruhi tingkat kepuasan pengguna. Jika pelaksana bertindak proaktif dan responsif, pengguna akan merasa lebih dihargai dan lebih mungkin untuk terus menggunakan aplikasi. Sebaliknya, sikap pelaksana yang lamban dan tidak responsif dapat menyebabkan aplikasi tidak berjalan dengan baik.

Pengelola aplikasi harus memberikan pelatihan yang lebih baik kepada karyawan atau kelompok yang menangani masalah pengguna. Keterampilan komunikasi yang baik dan pengetahuan teknis yang memadai diperlukan agar mereka dapat menyediakan solusi yang tepat dan cepat. Selain itu, sistem pengaduan atau umpan balik harus disederhanakan agar pengguna dapat dengan mudah melaporkan masalah mereka. Dengan demikian, kepuasan pengguna akan meningkat dan adopsi aplikasi akan meningkat.

Ada kemungkinan untuk menerapkan sistem pengaduan dan melakukan perbaikan yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, pengelola aplikasi harus memastikan masalah ditangani segera. Akibatnya, disposisi pelaksana dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi DPR E-Library.

4) Dimensi Struktur Birokrasi

Sehubungan dengan struktur birokrasi, sebagian besar orang yang menjawab mengatakan tidak mengalami

kesulitan untuk mendapatkan aplikasi. Namun demikian, ada keluhan bahwa masalah teknis belum ditangani dengan cukup cepat. Masalah ini sering disebabkan oleh birokrasi internal yang terlalu ketat. Tampak bahwa prosedur untuk melaporkan masalah atau meminta bantuan terlalu panjang dan berbelit-belit. Sebagian orang yang menjawab mengatakan bahwa aplikasi ini sulit digunakan karena mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan tanggapan. Ini menunjukkan bahwa sistem birokrasi yang ada masih dapat diperbaiki agar pengelola aplikasi dapat lebih cepat menangani masalah yang muncul di lapangan.

Selain itu, beberapa prosedur masih dianggap tidak praktis, tetapi sebagian besar responden menganggap proses layanan aplikasi ini mudah dipahami. Misalnya, orang menganggap proses registrasi dan verifikasi pengguna rumit dan memakan waktu. Mereka mengharapkan prosedur ini menjadi lebih mudah agar mereka tidak terbebani dengan proses administrasi yang panjang. Selain itu, masalah teknis seringkali hanya dapat diselesaikan melalui proses yang agak berbelit-belit, menjadikan aplikasi ini tidak nyaman untuk digunakan.

Studi yang dilakukan oleh Nugroho (2020) menemukan bahwa birokrasi yang terlalu kompleks dapat menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan kebijakan publik yang berbasis teknologi. Hal ini juga berlaku untuk aplikasi digital seperti DPR E-Library, di mana pengguna mungkin kesulitan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan karena birokrasi yang kaku dan lamban. Oleh karena itu, evaluasi struktur birokrasi yang ada sangat penting bagi pengelola aplikasi, dan juga untuk menyederhanakan prosedur yang ada agar

lebih mudah diakses dan efisien.

Menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat proses pengaduan dan perbaikan masalah adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi aplikasi. Misalnya, pengelola aplikasi dapat membuat sistem tiket untuk melacak dan menangani laporan masalah dengan cepat. Pengguna akan merasa dihargai dan masalah mereka akan diselesaikan dengan cepat dengan sistem ini. Dengan struktur birokrasi yang lebih fleksibel dan responsif, pengalaman pengguna akan jauh lebih baik.

Dua rekomendasi utama untuk meningkatkan struktur birokrasi adalah membuat sistem administrasi yang lebih sederhana dan saluran pengaduan yang lebih mudah diakses. Ini akan mempercepat proses penyelesaian masalah dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi DPR E-Library.

D. KESIMPULAN

Studi ini berkonsentrasi pada gagasan yang mendasari implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup empat aspek utama: sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana aplikasi DPR E-Library digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini memiliki banyak potensi untuk membuat materi kebijakan publik lebih mudah diakses, ada beberapa masalah yang harus diperhatikan sebelum aplikasi ini dapat digunakan sepenuhnya. Hasil ini memungkinkan pengelola aplikasi untuk melakukan inovasi dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas aplikasi mereka dalam jangka panjang.

Studi ini menunjukkan bahwa

banyak pengguna tidak tahu bagaimana menggunakan DPR E-Library. Meskipun aplikasi ini dipromosikan melalui berbagai saluran, seperti situs web dan media sosial, pengguna seringkali tidak memahami sepenuhnya bagaimana aplikasi ini digunakan. Hal ini memengaruhi jumlah aplikasi yang digunakan orang. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih terorganisir dan inklusif yang menggunakan berbagai alat komunikasi yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi yang lebih efektif akan membantu pengguna memahami keuntungan dan cara menggunakan aplikasi.

Dalam hal sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini menyediakan konten yang cukup relevan, koleksinya kurang up-to-date dan terbatas pada beberapa topik. Selain itu, beberapa responden menyatakan bahwa aplikasi ini terkadang sulit diakses pada perangkat dengan spesifikasi rendah, yang menjadi kendala bagi sebagian pengguna. Untuk meningkatkan kualitas aplikasi, pengelola harus secara teratur memperbaiki dan memperluas koleksi bacaan, serta memastikkannya. Untuk membuat pengguna lebih mudah menemukan apa yang mereka cari, peningkatan tampilan dan fitur pencarian aplikasi sangat penting.

Dari perspektif disposisi pelaksana, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pengelola aplikasi berusaha untuk membantu pengguna yang menghadapi kendala teknis, respons yang diberikan cenderung lambat dan kurang memadai. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini. Oleh karena itu, pengelola perlu memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada petugas dalam menangani masalah

teknis dan komunikasi. Pelatihan ini harus difokuskan pada kemampuan teknis serta keterampilan komunikasi agar petugas dapat memberikan solusi yang cepat dan efektif. Responsivitas pelaksana yang baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih positif.

Dalam hal struktur birokrasi, meskipun sebagian besar responden melaporkan bahwa mereka tidak menghadapi kendala besar dalam mengakses aplikasi, beberapa prosedur administratif, seperti registrasi dan verifikasi pengguna, masih dirasa rumit dan memakan waktu. Hal ini menghambat efisiensi penggunaan aplikasi. Untuk meningkatkan efisiensi, pengelola aplikasi perlu menyederhanakan prosedur administratif tersebut, memastikan bahwa pengguna dapat mengakses aplikasi dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, pengelola harus memastikan adanya sistem pengaduan yang mudah diakses agar pengguna dapat segera melaporkan masalah yang dihadapi, dan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Proses yang lebih efisien akan meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan aplikasi ini.

Secara keseluruhan, E-Library DPR memiliki potensi besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi kebijakan. Namun, beberapa aspek penting harus diperbaiki untuk mencapai keberhasilan yang optimal. Ini termasuk komunikasi yang lebih efektif, pembaruan sumber daya secara teratur, peningkatan responsivitas pelaksana, dan penyederhanaan prosedur administratif. Aplikasi ini akan menjadi lebih populer dan digunakan oleh masyarakat secara luas

sebagai hasil dari perbaikan ini, yang akan membantu meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain teknologi yang digunakan, faktor manusia, komunikasi yang efektif, dan sistem yang kuat adalah kunci keberhasilan aplikasi publik digital. Untuk memastikan bahwa aplikasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan masa depan, pengembang aplikasi harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Aplikasi E-Library DPR dapat menjadi contoh model aplikasi publik yang sukses, meningkatkan akses informasi dan proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Jurnal:

- Aini, N. R., & Amin, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Teknologi Terhadap Adopsi Layanan Digital di Lembaga Publik. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 14(2), 112-121.
- Budianto, F., & Nugroho, Y. (2022). Implementasi Aplikasi Digital dalam Layanan Perpustakaan: Studi Kasus di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 19(1), 75-85.
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Prentice-Hall.
- Fatimah, S. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pengguna Melalui Perpustakaan Digital: Studi Kasus pada Perpustakaan Umum. *Jurnal Pengembangan Teknologi Pendidikan*, 13(2), 72-81.
- Hidayati, M. (2021). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Perpustakaan Digital di Indonesia. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 10(3), 207-218.
- Jamil, S., & Rahmawati, F. (2021). Barriers to Digital Library Utilization: User Perception and Information Gaps. *Jurnal Perpustakaan Indonesia*, 13(2), 45-55.
- Koro, H. (2022). Penyuluhan dan Sosialisasi Teknologi Informasi untuk Peningkatan Penggunaan Perpustakaan Digital. *Jurnal Pengajaran dan Teknologi*, 20(1), 87-97.
- Kurniawan, A. (2022). Pengaruh Media Sosial terhadap Komunikasi Pemerintah dalam Penyuluhan Digital. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi*, 9(1), 98-107.
- Liu, F., Zhang, W., & Li, Y. (2021). The Role of Social Media in Public Sector Communication: Analyzing Informal

- Information Channels. *Journal of Public Administration*, 38(3), 134-145.
- Prasetyo, B. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Memperkenalkan Aplikasi Digital: Pengalaman dari Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Publikasi*, 22(3), 121-130.
- Pratiwi, R. (2023). Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Akses Informasi di Perpustakaan Digital. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 21(4), 145-153.
- Rachmawati, E., & Surya, S. (2020). Efektivitas Komunikasi Digital dalam Pemerintahan: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Layanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(4), 203-212.
- Setiawan, D., & Purnomo, P. (2020). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Perpustakaan di Era 4.0. *Jurnal Inovasi Perpustakaan*, 7(2), 65-72.
- Sari, M., & Nugroho, T. (2023). Meningkatkan Akses Informasi Melalui Saluran Komunikasi Digital di Sektor Publik. *Jurnal Komunikasi Digital*, 16(1), 77-85.
- Wibowo, A., & Kurniawan, R. (2022). Strategi Pengembangan Layanan Digital pada Perpustakaan Pemerintah. *Jurnal Manajemen Publik*, 11(2), 50-60.
- Yuliana, T. (2022). Faktor Penghambat Adopsi Perpustakaan Digital di Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 15(1), 99-106.